Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

ANALISIS KEBIJAKAN ZONASI SEKOLAH DALAM PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN SERTA PERUBAHAN STRUKTUR SOSIAL

Khusnul Lailly Enriyani

Universitas Indraprasta PGRI

A R T I C L E I N F O

Article history:
Received Juli 2026
Revised Juli 2026
Accepted Juli 2026
Available Juli 2026

khusnulailly@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Abstrak

Sistem rekrutmen siswa yang hanya mengutamakan nilai akademik telah menciptakan polarisasi dan kastanisasi dalam dunia pendidikan. Pola meritokrasi ini memicu lahirnya label sekolah favorit yang terkadang didominasi oleh kelas sosial ekonomi atas, sementara sekolah pinggiran cenderung terabaikan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur (studi kepustakaan) dengan menganalisis berbagai dokumen, regulasi, dan artikel ilmiah terkait. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan sosiologis, khususnya menurut teori Talcott Parsons (fungsionalisme struktural) dan teori Karl Max (konflik) untuk membedah interaksi dan respons masyarakat terhadap perubahan kebijakan ini. Pemerintah mencoba mengembalikan fungsi sekolah sebagai lembaga sosialisasi yang menyatukan nilai-nilai masyarakat secara adil. Sebaliknya, fenomena sekolah favorit dilihat sebagai bentuk penguasaan fasilitas dan kesempatan oleh kelompok masyarakat kelas atas. Ketika kenyamanan terusik oleh aturan zonasi, muncul reaksi berupa cara-cara curang, salah satunya adalah fenomena manipulasi data domisili.

Kata kunci: Zonasi, Pendidikan, Struktur Sosial

PENDAHULUAN

Selama ini sistem pendidikan sempat terjebak dalam pengotakan atau kastanisasi sekolah. Hal ini terjadi karena aturan penerimaan siswa baru hanya fokus pada nilai akademik semata. Sistem seleksi seperti ini akhirnya memicu jurang pemisah di masyarakat, sekolah tertentu dianggap sebagai sekolah favorit yang terkadang didominasi oleh anak-anak dari keluarga mampu dengan fasilitas lengkap, sementara sekolah di pinggiran cenderung terabaikan. Akibatnya, sekolah tidak lagi menjadi tempat bagi anak-anak dari berbagai latar belakang untuk saling membaur, melainkan justru memperjelas ketimpangan sosial.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mengambil langkah lewat kebijakan zonasi. Melalui kebijakan ini, syarat masuk sekolah diubah dari yang tadinya berdasarkan nilai menjadi berdasarkan jarak rumah. Tujuannya sangat baik, yaitu mengubah kesan dari sekolah favorit dan non-favorit agar semua anak dengan latar belakang ekonomi keluarganya yang berbeda bisa mendapatkan hak dan akses pendidikan yang sama rata.

Namun, dalam pelaksanaannya, perubahan aturan ini menghadapi tantangan besar di lapangan. Banyak orang tua yang masih tidak setuju karena merasa kerja keras dan prestasi anak mereka untuk masuk sekolah terbaik jadi terabaikan akibat aturan jarak ini. Akibatnya, muncul berbagai tindakan curang seperti manipulasi data domisili atau kartu keluarga. Kenyataan ini membuktikan bahwa mengubah sebuah aturan di atas kertas ternyata jauh lebih mudah daripada mengubah cara berpikir masyarakat tentang arti keadilan dalam pendidikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan untuk menyelidiki dampak kebijakan zonasi sekolah dalam pemerataan kualitas pendidikan serta perubahan struktur sosial. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kebijakan zonasi dalam perubahan struktur sosial; (2) mengidentifikasi dampak kebijakan zonasi dalam pemerataan kualitas pendidikan; (3) mengevaluasi dampak positif dan negatif kebijakan zonasi dalam perubahan struktural sosial dan pemerataan kualitas pendidikan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif. Dimana digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam tanpa melalui prosedur statistic. Penelitian yang akan ditulis akan menguraikan makna, nilai, serta pola interaksi manusia yang terkandung di dalam teks. Pilihan metode ini didasarkan pada kesesuaian karakteristik masalah yang diteliti, dimana kedalaman pemahaman lebih diutamakan daripada keluasan generalisasi data.

Adapun jenis penelitian yang diterapkan adalah studi literatur (*library research*), dimana proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai sumber dari buku, jurnal, artikel imiah yang berkaitan dengan kebijakan sistem zonasi sekolah dan pengaruhnya terhadap pemerataan kualitas pendidikan serta perubahan struktur sosial.

Untuk membedah fenomena yang dikaji, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan ini memandang bahwa objek yang diteliti tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam sebuah struktur, institusi, dan relasi sosial masyarakat. Melalui pendekatan sosiologi, peneliti dapat menganalisis bagaimana tindakan individu atau kelompok dipengaruhi oleh norma, nilai, kelas sosial, dan konflik yang terjadi di lingkungannya.

TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL

Menurut Sulistiawati & Nasution (2022) disebutkan bahwa Talcott Parsons memperkenalkan konsep AGIL sebagai syarat utama sistem sosial termasuk sekolah dalam kebijakan zonasi agar tetap stabil dan tidak hancur. A (*Adaptation*) berarti sistem harus mampu beradaptasi dengan lingkungan, seperti sekolah yang harus menyesuaikan cara mengajar karena muridnya saat ini lebih beragam. G (*Goal Attainment*) adalah upaya mencapai tujuan bersama,

yaitu mewujudkan pemerataan pendidikan yang adil bagi semua kalangan. I (*Integration*) berfungsi menyatukan bagian-bagian yang berbeda, dimana zonasi memaksa anak dari berbagai kelas sosial untuk membaur dan bersatu. Terakhir, L (*Latency*) adalah cara mempertahankan nilai dan budaya, seperti menjaga semangat gotong royong agar masyarakat tetap patuh pada aturan baru demi menjaga keseimbangan social.

Teori ini melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk menciptakan keseimbangan sosial. Dalam masyarakat, setiap bagian itu saling memengaruhi satu sama lain. Tidak ada persatuan (integrasi) yang benar-benar sempurna, tetapi pada dasarnya masyarakat akan selalu berusaha untuk tetap stabil dan seimbang. Meskipun terkadang ada masalah, kekacauan, atau kecurangan, masyarakat tetap menghadapi secara bersama-sama. \

TEORI KONFLIK

Teori konflik Karl Marx melihat masalah dimulai dari sistem kapitalis yang menciptakan ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Perbedaan kepentingan, bentrokan atau konflik sering terjadi karena adanya ketimpangan dalam penguasaan sumber daya dan kekuasaan (Prayogi et al.,2025). Semua institusi sosial termasuk pendidikan menjadi alat bagi kelompok yang punya kuasa untuk menanamkan cara pandang mereka untuk mempertahankan posisi dominan mereka.

Seharusnya sekolah menjadi landasan untuk memberikan kesempatan belajar yang setara bagi setiap anak, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sekolah sering kali memperjelas jurang ketimpangan sosial di masyarakat. Bukannya menghapus perbedaan latar belakang, institusi pendidikan terkadang malah terjebak dalam struktur sosial yang tidak adil, sehingga kualitas yang didapat siswa masih sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan kelas sosial mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengaruh Kebijakan Zonasi dalam Perubahan Struktur Sosial

Sebelum penerapan sistem zonasi, sekolah pendidikan dibedakan antara sekolah favorit dan non-favorit yang berkaitan dengan status sosial ekonomi masyarakat. Banyak siswa yang tidak bisa masuk ke sekolah unggulan hanya karena keterbatasan akses dan sumber daya yang mereka miliki. Realitas ini menunjukkan bahwa sekolah belum sepenuhnya menjalankan fungsinya sebagaimana pendapat Sari & Zahirah (2025), yang menegaskan bahwa sekolah seharusnya menjadi pondasi utama dalam memberikan kesempatan yang setara bagi setiap anak tanpa memandang latar belakang sosial mereka.

Dalam perspektif Parsons negara berfungsi menjaga keseimbangan pendidikan. Dalam perspektif ini, kebijakan zonasi dipandang sebagai bentuk pembangunan pendidikan untuk menciptakan keteraturan dan pemerataan social. Parsons menjelaskan bahwa agar masyarakat berjalan dengan baik, harus ada 4 fungsi berikut:

Pertama, fungsi adaptasi dimana menuntut masyarakat dan calon siswa untuk menyesuaikan diri dengan realitas baru, dimana mereka harus memilih sekolah berdasarkan wilayah zonasi yang telah ditetapkan. Kedua, fungsi pencapaian tujuan, diarahkan untuk mengatasi masalah ketimpangan dengan mengurangi kesenjangan kualitas antara sekolah yang dianggap favorit dan non-favorit. Selanjutnya, fungsi integrasi, berfungsi dalam mengurangi adanya pengelompokan sosial di lingkungan sekolah, sehingga tidak ada lagi polarisasi yang dilihat dari status ekonomi atau latar belakang sosial siswa. Terakhir, fungsi pemeliharaan pola, berfungsi mewujudkan sekolah yang berhasil menanamkan nilai-nilai kesetaraan yang dimana mampu mengubah pola pikir tradisional masyarakat mengenai dikotomi sekolah favorit.

Menurut teori diatas, kebijakan ini membawa dampak baik bagi seluruh elemen baik siswa, orang tua, sekolah dan masyarakat. Kebijakan zonasi membuat siswa dari berbagai ekonomi, budaya dan lingkungan belajar bersama dalam satu sekolah. Hal ini akan meningkatkan interaksi social dan memperluas hubungan antarkelompok masyarakat. Sistem zonasi ini juga mendorong perubahan pola pikir masyarakat bahwa kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada label sekolah atau sekolah favorit tetapi harus dapat dirasakan diseluruh sekolah secara merata.

Sedangkan menurut teori konflik, negara belum sepenuhnya mampu menciptakan perubahan struktur social yang adil. Pada kenyatannya, sebagian orang tua merasa sistem zonasi tidak sepenuhnya adil bagi siswa berprestasi karena jarak tempat tinggal lebih di prioritaskan dibanding nilai akademik begitupun sebaliknya sebagian orang tua setuju dengan kebijakan ini dikarenakan anak anak dapat menghemat biaya dan waktu untuk sekolah. Permasalahan selanjutnya, Sebagian masyarakat menolak zonasi karena merasa kebebasan memilih sekolah menjadi terbatas. Hal ini sejalan dengan pendapat Madiana et al. (2022) yang menyatakan bahwa penerapan sistem zonasi ini dinilai memicu diskriminasi yang merugikan hak siswa untuk masuk sekolah negeri serta membatasi peluang bagi siswa yang berprestasi. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang berniat menghilangkan sudut pandang orangtua terhadap sekolah favorit dan nonfavorit justru memicu ketegangan sosial baru akibat hilangnya tempat apresiasi terhadap prestasi individu. Selain itu, beberapa masyarakat

memanipulasi domisili agar dapat masuk ke sekolah favorit atau terbaik. Hal ini menunjukan bahwa persaingan social dalam pendidikan masih tetap terjadi.

b. Dampak Kebijakan Zonasi dalam Pemerataan Kualitas Pendidikan

Kebijakan zonasi sekolah merupakan kebijakan pemerintah dalam sistem penerimaan peserta didik baru yang bertujuan menciptakan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Melalui sistem ini, siswa diprioritaskan masuk sekolah berdasarkan wilayah tempat tinggal agar tidak terjadi penumpukan peserta didik di sekolah favorit. Kebijakan ini menjadi bagian dari pembangunan pendidikan karena pemerintah berusaha mengurangi kesenjangan antar sekolah.

Dalam perspektif teori AGIL dari Parsons, kebijakan zonasi digunakan sebagai upaya menjaga keseimbangan dan keteraturan social dalam masyarakat. Sebelum adanya kebijakan zonasi, banyak siswa berprestasi terpusat di satu sekolah atau dikenal sekolah favorit. Setelah zonasi diterapkan, penyebaran siswa menjadi lebih merata sehingga pemerintah meningkatkan kualitas semua sekolah secara bertahap. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Sidik (2024) dimana nilai-nilai siswa tertinggi begitupun sebaliknya tidak terpusat pada satu sekolah saja tetapi tersebar berdasarkan wilayah tempat tinggal. Oleh karena itu, karena semua sekolah harus menerima siswa di wilayah sekitar, pemerintah harus meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan agar kualitas sekolah tidak timpang. Sekolah yang sebelumnya dianggap kurang unggul akan terdorong untuk meningkatkan kualitas pendidikan karena jumlah peserta didik menjadi lebih seimbang.

Namun, menurut teori konflik ketimpangan masih bisa terjadi. Dalam pelaksanaannya, kualitas sekolah masih belum merata. Menurut Marwan et al. (2024) Kualitas pembelajaran ditentukan oleh kelayakan sarana dan prasarana. Keberadaan perangkat teknologi, jaringan internet yang stabil, serta adanya ruang laboratorium akan mendorong interaksi yang lebih aktif antara guru dan siswa. Selain itu, ketersediaan fasilitas pendukung seperti perpustakaan juga berperan dalam memperluas wawasan siswa. Namun realitanya, saat ini masih banyak sekolah yang sarana dan prasarananya belum terpenuhi. Akibatnya, terjadi rasa kekhawatiran bagi siswa bahwa mereka tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Selain itu, ketidakseimbangan antara tingginya minat calon siswa dengan ketersediaan kuota sekolah di area tempat tinggal mereka. Persaingan memperebutkan kursi di sekolah negeri membuat sistem zonasi tidak menjamin setiap anak dapat diterima di sekolah terdekat. Hal ini mengakibatkan anak merasa cemas, kecewa, atau merasa gagal, padahal masalah utamanya adalah keterbatasan kuota daya tampung sekolah, bukan kemampuan akademik mereka. Hal ini juga diperkuat oleh hasil penelitian Novrijayanti et al. (2021) yang menyatakan bahwa kebijakan sistem zonasi ini dirasa

membatasi kebebasan siswa dalam memilih sekolah impian. Kewajiban untuk sekolah di tempat yang tidak sesuai dengan minat berpotensi menurunkan motivasi dan semangat belajar siswa.

C. Dampak Positif dan Negatif Kebijakan Zonasi Dalam Perubahan Struktural Sosial dan Pemerataan Kualitas Pendidikan.

Penerapan kebijakan zonasi sekolah sebagai bagian dari pembangunan pendidikan memberikan pengaruh terhadap perubahan struktur social masyarakat dan pemerataan kualitas pendidikan. Kebijakan inni mengubah pola hubungan social, pandangan atau persepsi masyarakat terhadap status sekolah. Oleh karena itu, kebijakan zonasi menghasilkan dampak social positif ataupun negatif dalam kehidupan masyarakat dan pemerataan kualitas pendidikan.

Dampak Positif:

1. Meminimalkan Perspektif Sekolah Favorit: meratakan akases layanan pendidikan, melalui program ini setiap sekolah bersaing untuk memiliki kualitas pendidikan yang baik dan tidak kalah dengan sekolah yang sudah dianggap favorit.
2. Pemenuhan Rombongan Belajar: Dengan sistem zonasi, calon peserta didik didistribusikan secara merata berdasarkan jarak rumah ke sekolah terdekat. Hasilnya, sekolah-sekolah yang dulunya sepi peminat kini bisa memenuhi kuota rombel mereka secara ideal (misalnya 32–36 siswa per kelas), sehingga fasilitas sekolah dan alokasi guru dapat dimanfaatkan secara maksimal.
3. Memudahkan Pengawasan Orangtua: Zonasi membuat anak bersekolah di lingkungan yang tidak jauh dari domisilinya. Hal ini membuat orang tua lebih mudah mengontrol aktivitas anak, memantau jam pulang sekolah, serta menjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih intens dengan pihak sekolah maupun lingkungan sekitar sekolah jika terjadi sesuatu (Salim & Nora., 2022).

Dampak Negatif:

1. Kualitas sekolah yang belum setara: Sistem zonasi belum tentu langsung menaikkan mutu sekolah. Akibatnya, sebagian sekolah di wilayah tertentu masih mengalami keterbatasan fasilitas, kekurangan guru yang kompeten, atau belum memiliki program belajar yang memadai.
2. Siswa kecewa dan kurang bersemangat: Banyak siswa terpaksa mengubur impian untuk masuk ke sekolah pilihan mereka yang dianggap lebih bermutu. Hal ini berisiko menurunkan minat dan semangat belajar mereka.

3. Memicu kecurangan: aturan jarak ini memicu tindakan tidak jujur, salah satunya fenomena memalsukan atau menitipkan alamat pada Kartu Keluarga (KK) agar posisinya lebih dekat dengan sekolah yang diminati.
4. Jumlah murid yang tidak seimbang: Adanya risiko terjadinya penumpukan calon siswa pada sekolah tertentu, sementara sekolah lain dalam wilayah yang sama justru kekurangan murid (Oktaviani et al., 2025).

KESIMPULAN

Kebijakan sistem zonasi dalam sistem penerimaan siswa baru merupakan upaya pemerintah untuk memutus kastanisasi sekolah favorit dan non-favorit demi mewujudkan keadilan sosial. Namun, tanpa dibarengi dengan pemerataan fasilitas dan mutu guru di semua wilayah, kebijakan ini justru memicu konflik sosial baru. Struktur sosial tidak berubah menjadi lebih setara, melainkan memicu strategi baru dari kelompok yang memiliki kekuatan dominan untuk mempertahankan posisi sosial mereka, sementara siswa dari kelompok rentan berisiko mengalami demotivasi dan terpinggirkan dari akses pendidikan yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Madiana, I., Alqadri, B., Sumardi, L., & Mustari, M. (2022). Penerapan kebijakan sistem zonasi serta dampaknya terhadap kesetaraan hak memperoleh pendidikan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, 7*(2c), 957-964.

Marwan, I., Gustaman, R. F., & Gandi, A. (2024). Dikotomi sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia. *Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, *2*(3), 155-161.

Novrijayanti, I., Astika, Y. W., Sari, M., & Jesika, S. (2021). Implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi untuk pemerataan kualitas pendidikan. *Jasiora: Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora*, *4*(2), 71-80.

Oktaviani, V., Hayatunnisa, A., Aulia, L., & Talitha, T. A. (2025). Evaluasi dampak kebijakan sistem zonasi terhadap pemerataan akses pendidikan di tingkat sekolah dasar dan menengah. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, *1*(2), 71–77.

Prayogi, A., Nasrullah, R., Setiawan, S., & Setyawan, M. A. (2025). Konsep konflik dan teori konflik sosial dalam pemikiran Karl Marx. *JURNAL SINORA*, *1*(1).

Salim, F. P., & Nora, D. (2022). Dampak Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi (Studi kasus: Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar di Kecamatan Matur). *Naradidik: Journal of Education & Pedagogy*, *1*(1), 67–77.

Sari, N. A., & Zahirah, Z. (2025). Upaya mengatasi kesenjangan sosial di sekolah dasar dalam perspektif teori konflik Karl Marx. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, *2*(3).

Sidik, F. (2024). Pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah dan dampaknya terhadap kualitas sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama: Studi kasus di Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, *24*(1), 47-56.

Sulistiawati, A., & Nasution, K. (2022). Upaya penanaman pendidikan karakter di sekolah dasar: Telaah pendekatan struktural fungsional Talcott Parsons. *Jurnal Papeda: Jurnal Publikasi Pendidikan Dasar*, *4*(1).